

CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA PENYERAPAN ANGGARAN

BUDGET PLANNING, QUALITY OF HUMAN RESOURCES, BUDGET EXECUTION, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS ON BUDGET ABSORPTION

Nursela Nursela^{1*}, Taufeni Taufik², Hariadi Yasni³

¹²³*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Kota Pekanbaru*

*Email: nursela0317@student.unri.ac.id

Keywords

*Budge Absorption,
 Budget Planning,
 Quality of
 Human Resources,
 Budget Execution,
 Organizational
 Commitment*

Article informations

Received:

2021-10-19

Accepted:

2022-03-21

Available Online:

2022-03-30

Abstract

The low level of budget absorption is often a problem for Regional Apparatus Organizations (OPD). The research is conducted to describe the effect of budget planning, the quality of human resources, budget execution, and organizational commitment to the absorption of regional revenue and expenditure budgets in the Regional Apparatus Organizations of Pelalawan Regency. The population in this study were all OPD employees in Pelalawan Regency. Sample selection using a purposive sampling method. Data was collected by distributing questionnaires to 84 respondents, and only 78 questionnaires could be used in this study. The data analysis method used is Multiple Linear Regression using SPSS version 22. The results showed that budget planning, quality of human resources, budget execution, and organizational commitment had an effect on the level of budget absorption in the OPD Pelalawan Distrik. The results of this study have contributed to the OPD by increasing the absorption of regional revenue and expenditure budget.

PENDAHULUAN

Serapan dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga saat ini tetaplah permasalahan di banyak daerah. Fenomena APBD yang di awal periode rendah penyerapan serta di akhir tahun terdapat akselerasi serapan. Seringkali ini menjadi perbincangan dikalangan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media. Contohnya terdapat anggaran Rp.10 juta dan telah direalisasikan Rp.9 juta, artinya level serapan anggaran 90%. Hal ini umumnya terjadi ketika periode anggaran akan berakhir, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupaya dalam melakukan serapan anggaran hingga 100% supaya penyerapan anggaran tidaklah dianggap rendah. Hal ini banyak terjadi dalam beberapa wilayah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri atas nama Tjahjo Kumolo (Friana, 2018) menjelaskan bahwasannya perrealisasian dalam belanja tingkat daerah mengalami peningkatan dalam kuartal 3 atau 4.

Penyerapan APBD Kabupaten Pelalawan masih tergolong rendah/tidak terserap seluruhnya. Untuk tahun 2016 persentase penyerapan anggaran sebesar 81% dari dana yang disahkan. Pada tahun 2017 sudah mengalami peningkatan yang signifikan yakni 86,87%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yakni 80,20%. pada tahun 2019 persentase



penyerapan kembali mengalami peningkatan namun tidak signifikan yakni 82,15%. Dalam 4 tahun terakhir hanya tahun 2017 persentase penyerapan bisa dikatakan tinggi, namun untuk penyerapan anggaran 1 tahun itu minimal 90% dari dana yang disahkan oleh lembaga legislatif (goriau.com). Penyerapan anggaran yang rendah masyarakat merugi. Dalam hal ini dari pengamat PSKK atau disebut Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan di Universitas Gajah Mada (UGM), Satria Aji Imawan (Friana, 2018) menjelaskan bahwasannya permasalahan tersebut membawa dampak secara langsung terhadap masyarakat dikarenakan program yang dilakukan pemerintah mengalami hambatan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perbaikan dan pengoptimalan serapan anggaran setiap OPD atau Organisasi Perangkat Daerah. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan membawa pengaruh bagi kepercayaan khalayak Publik untuk performa Kepala Daerah. Publik mempunyai tingkat sensitivitas tinggi untuk anggaran. Oleh karena itu Publik tidak akan bersikap biasa saja. Sebaliknya, Publik akan merasa marah apabila serapan anggaran rendah dikarenakan hal tersebut adalah utamanya sorotan bagi Publik dalam memantau performa pemerintah.

Halim (2014) menjelaskan bahwa serapan anggaran dikatakan baik apabila dimulai oleh perencanaan anggaran yang baik pula, apabila tidak terdapat perencanaan, maka hal tersebut dianggap mustahil untuk terwujud. Penelitian yang dilakukan (Harahap et al., 2020) menampilkan bahwasannya perencanaan dalam anggaran membawa pengaruh bagi serapan anggaran. Lain halnya dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Rifai et al., 2016) dengan menampilkan bahwasannya perencanaan dalam anggaran tidak membawa pengaruh bagi serapan anggaran. Selanjutnya masing-masing organisasi swasta maupun Publik perlu melakukan pembangunan SDM yang memiliki profesionalitas dan berkualitas. SDM berkualitas mampu membawa daya unggul suatu organisasi di zaman modern globalisasi dalam menghadapi lingkungan hingga kondisi masyarakat yang bersifat dinamis. Tidak dikecualikan masing-masing OPD untuk melaksanakan program kerja utamanya untuk melakukan penyusunan penganggaran. Terutama dalam hal regulasi yang menjadi pedoman kerja, maka diperlukan pegawai yang memiliki kualitas dalam mengambil suatu keputusan S. I. Putri (2014). Hal ini didukung dengan penelitian Ardinisari (2019) dan (Hamidah et al., 2020) menemukan bahwasannya kualitas SDM membawa pengaruh bagi serapan anggaran. Lain halnya dalam studi yang dilaksanakan oleh Rerung et al. (2017) menjelaskan bahwasannya kualitas SDM tidak membawa pengaruh bagi serapan anggaran.

Hal lainnya yang membawa pengaruh serapan anggaran ialah realisasi anggaran yang menjadi tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan yang perlu dilakukan sesudah perencanaan anggaran. Realisasi atau pelaksanaan ialah upaya dalam melakukan realisasi atau perwujudan rencana serta kebijakan yang telah tercantum dalam rumusan dan tetapan (BPKB, 2011). Penelitian Ramdhani & Anisa (2017) tata laksana anggaran membawa pengaruh yang positif bagi serapan anggaran. Kekurangmaksimalan tata laksana anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan rencana adalah gambaran dari rendahnya anggaran yang diwujudkan yang kemudian membawa pengaruh bagi level serapan anggaran. Sedangkan menurut penelitian (Rifai et al. (2016) diperoleh hasil bahwasannya tata laksana anggaran tidak membawa pengaruh bagi serapan anggaran.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi yaitu komitmen organisasi. Output studi yang dilaksanakan oleh Grezko (2011) memberikan simpulan bahwasannya apabila komitmen organisasi individu mengalami peningkatan, maka kerelaan optimalisasi potensi akan semakin tinggi pula. Menurut Putri et al. (2017) komitmen suatu organisasi akan membawa pengaruh yang positif bagi serapan anggaran. Pengawasan yang rendah oleh ketua SKPD untuk tata laksana aktivitas serta anggaran, dan tata laksana aktivitas yang kurang sesuai dalam rencana merupakan gambaran rendahnya komitmen organisasi yang nantinya membawa pengaruh bagi serapan anggaran. Berbeda halnya dengan output studi dari Ardinisari (2019) dimana komitmen organisasi tidaklah membawa pengaruh bagi serapan anggaran.

Studi ini merupakan pengembangan terhadap studi Ramdhani & Anisa (2017) yang meneliti tentang pengaruh dari rencana anggaran, kualitas SDM, serta tata laksana anggaran bagi serapan anggaran dalam organisasi daerah Banten. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa rencana anggaran, kualitas SDM, serta tata laksana anggaran membawa pengaruh bagi serapan anggaran. Studi ini berbeda terhadap studi terdahulu yang mana dalam studi ini ada tambahan variabel komitmen organisasi. Latar belakang menambah variabel Komitmen Organisasi karena masih sedikit penelitian tentang variabel Komitmen Organisasi dan masih terdapatnya *gap riset* dari hasil penelitian terdahulu yang menggunakan variabel Komitmen Organisasi.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Anggaran ialah salah satu dari sumber dana yang akan dipergunakan aktivitas dalam melakukan pembangunan keperluan masyarakat. Sehingga penyusunannya perlu memperhatikan kemungkinan perencanaan belanja anggaran yang akan dipergunakan efektif serta efisien bagi fungsi anggaran yang merupakan sarana rencana.

Visi dan misi program Kepala Daerah merupakan bahan baku dalam susunan agenda aktivitas 5 tahun yang tercantum dalam Dokumen RPJM-D. Atas dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pencegahan bahwasanya RPJM-D disusun dengan pedoman RPJP-D serta mempertimbangkan RPJM-Nas.

Berdasarkan pelaporan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013) bahwasannya tingkat serapan anggaran daerah untuk melakukan pendanaan layanan Publik dipengaruhi proses rencana anggaran. Rencana yang buruk merupakan suatu hambatan dalam serapan anggaran. Rencana anggaran melakukan kontribusi tinggi dalam serapan anggaran. Apabila rencana anggaran kian tinggi, maka serapan anggaran juga meningkat.

Output studi tersebut memberikan dukungan atas output studi (Halim, 2014) yang menjelaskan bahwasannya aspek rencana yang dianggap tidak matang untuk menentukan anggaran akan dilakukan penyajian yang memberikan dampak bagi hambatan program kerja, hal ini disebabkan rencana dan pelaksanaan program kerja tidak seimbang dan memberikan dampak bagi serapan anggaran. Dalam studi (Kuswoyo, 2012) terkait faktor yang melatarbelakangi tumpukan anggaran belanja di akhir periode satuan kerja dalam KPPN Kediri pun memberi hasil bahwasannya faktor perencanaan membawa pengaruh signifikan bagi sebab tumpukan anggaran belanja. Studi (Herriyanto, 2012) terkait faktor yang membawa pengaruh bagi hambatan serapan anggaran belanja satuan kerja area Jakarta membawa hasil rencana memiliki pengaruh signifikan bagi terhambatnya serapan anggaran. Atas dasar landasan teori itu, dijelaskan hipotesis berikut:

H₁: Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Pemerintah struktural yang di bawahnya seharusnya mampu melakukan perwujudan impian rakyat dalam pembangunan suatu daerah dikarenakan pemerintah mempunyai posisi kuasa dalam pengelolaan keuangan serta SDM dalam praktikal aktivitas pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan negara secara efisien maupun efektif. Hal ini menjelaskan kualitas SDM mampu membawa pengaruh bagi kenaikan atau turunnya serapan anggaran.

Menurut (Herriyanto, 2012) dalam penelitiannya terkait latar belakang faktor yang membawa pengaruh bagi terhambatnya serapan anggaran satuan kerja Jakarta memberi output bahwasannya SDM membawa pengaruh signifikan bagi terhambatnya serapan anggaran. SDM merupakan tenaga kerja tata laksana anggaran yang ditunjukkan melalui fungsi individu sebagai salah satu panitia yang menyediakan suatu produk. Masalah SDM diawali oleh pekerjaan panitia sebagai sampingan kerja pokok yang mengakibatkan kompeten rendah



untuk tata laksanaanya.

Penelitian (Zarinah et al., 2016) (Hamidah et al., 2020) mengemukakan bahwasannya rendahnya kualitas SDM akan memberikan akibat bagi rendahnya serapan anggaran. (Putri et al., 2017) dalam penelitiannya menunjukkan kualitas SDM memberikan pengaruh bagi serapan anggaran. Atas dasar tersebut, dikemukakan hipotesis yakni:

H₂: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Tata laksana anggaran ialah perwujudan dalam susunan anggaran yang ditentukan oleh kualitas SDM serta rencana anggaran. Dalam hal ini, yang paling penting ialah proses tata laksana tersebut yang mencakup permasalahan internal, penyediaan produk, hingga mechanism pembayaran yang akan membawa pengaruh bagi serapan anggaran (Malahayati et al., 2015). Tata laksana anggaran menjadi alat manajemen implementasi anggaran serta kendali keuangan organisasi dan kebijakan perekonomian untuk memberikan arahan bagi situasi ekonomi agar lebih baik seiring perubahan penerimaan dan belanja pemerintah (Ari, 2016). Besarnya tata laksana anggaran akan memberikan dampak pada peningkatan serapan anggaran, tata laksana anggaran yang nantinya memberikan pengaruh serapan APBD (Gagola et al., 2017).

Menurut (Ramdhani & Anisa, 2017) dalam studinya terkait pengaruh rencana anggaran, kualitas SDM, hingga tata laksana anggaran bagi serapan anggaran organisasi Banten memberi hasil bahwasanya tata laksana tersebut memberi pengaruh bagi serapan anggaran. Atas dasar studi (Jauhari, 2017), tata laksana anggaran memberi pengaruh bagi serapan anggaran. Atas dasar studi (Suyono, 2020), tata laksana anggaran memberi pengaruh bagi serapan anggaran. Atas dasar tersebut, dikembangkanlah hipotesis yakni:

H₃: Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan anggaran.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

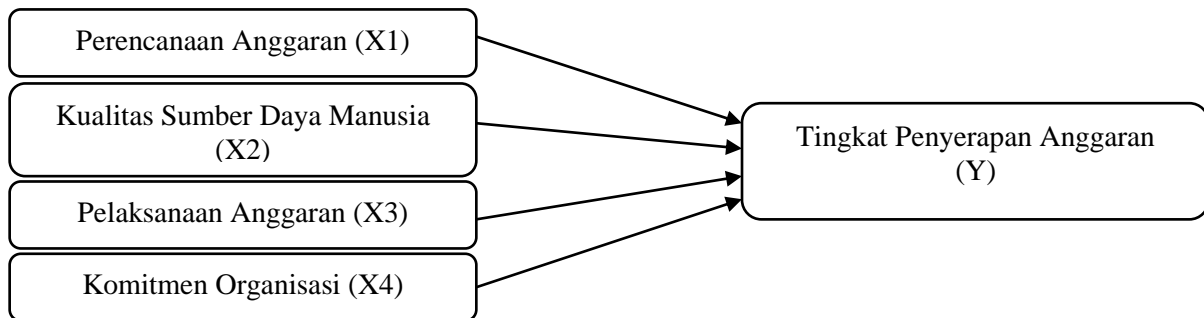
Berdasarkan teori goal-setting, karyawan dengan komitmen tinggi bagi organisasi pemda akan memberikan kepentingan bagi organisasi lebih tinggi dari kepentingan individu yang mendukung karyawan dalam meraih target anggaran sebagaimana sasaran organisasi. Hal ini memberi implikasi bagi peraihan serapan APBD. Komitmen karyawan bagi capaian tujuan akan berupaya dalam meraihnya dan memberikan kedudukan kepentingan organisasi sebagai prioritas serta memberikan dukungan seutuhnya bagi target organisasi. Menurut (Putri et al., 2017), studinya terkait pengaruh rencana anggaran, kualitas SDM, serta komitmen organisasi bagi serapan anggaran memberi output bahwasannya komitmen dalam organisasi memberi pengaruh bagi serapan anggaran.

(Zarinah et al., 2016) dalam studinya terkait pengaruh rencana anggaran serta kualitas SDM bagi serapan anggaran satker perangkat daerah Aceh Utara memberi hasil bahwasannya komitmen organisasi memberi pengaruh bagi serapan anggaran. Studi (Ramdhani & Anisa, 2017), mengemukakan komitmen organisasi memberi pengaruh bagi serapan anggaran. Atas dasar tersebut dikembangkanlah hipotesis berikut.

H₄: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Model Penelitian

Dalam menjelaskan korelasi variabel bebas dan variabel terikat, diberikan model penelitian berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi studi ini ialah seluruh Pegawai OPD pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang menyusun dan menetapkan, melakukan pelaksanaan, serta tanggung jawab tata laksana APBD tahun 2019, dimana OPD di Pemerintah Kabupaten Pelalawan berjumlah 28 OPD. Teknik pengumpulan sampel studi ini ialah *purposive sampling* yakni dengan menentukan kriteria sampel, Dari setiap OPD akan diambil Eselon II, III, IV dengan kriteria 1) Kepala OPD/Pengguna Anggaran (PA): dengan tugas dan wewenang adalah melakukan penyusunan RKA, DPA-OPD, pengguna anggaran KP dan memiliki tanggung jawab wewenang bagi Kepala OPD, melakukan penyiapan atas dokumen anggaran dan tata laksana aktivitas, serta bendara dalam pengeluaran Kabupaten Pelalawan. Data studi ini didapatkan melalui sebaran angket bagi setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Tabel 1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Penyerapan Anggaran	Penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu etimasi pencapaian anggaran di periode tertentu. (Halim, 2014)	1. Tingkat Penyerapan Anggaran pada OPD lebih dari 90% 2. Mendapatkan penghargaan atas tingkat serapan dana yang telah dicapai 3. Persentase penyerapan anggaran pada OPD dapat raport Merah 4. Persentase Penyerapan Anggaran pada OPD proposional setiap bulannya (S. I. Putri, 2014)	<i>Ordinal</i>



Perencanaan Anggaran	Perencanaan (<i>planning</i>) ialah proses diawali dari tetapan strategi dalam peraihan tujuan komprehensif dengan rumusan perencanaan komprehensif dalam melakukan integrasi serta koordinasi pekerjaan organisasi dalam meraih tujuan itu (Robbins & Coulter, 2002)	1. Komprehensif 2. Terperinci 3. Disiplin 4. Fleksibel 5. Prioritas 6. Keterbukaan (Syarah, 2016)	<i>Ordinal</i>
Kualitas Sumber daya Manusia	(Spencer & Spencer, 1993), kualitas ialah hal dasar karakteristik individu yang dikorelasikan dengan hasil pekerjaannya.	1. Pengalaman baik 2. Pendidikan sesuai pekerjaan 3. Keterampilan sesuai tugas (Sutrisno & Mariyono, 2017)	<i>Ordinal</i>
Tata laksana Anggaran	Tata laksana anggaran ialah tahap mengelola keuangan sesudah perencanaan anggaran sebagai upaya dalam melakukan realisasi renana serta kebijakan dalam rumusan ketetapan (BPKB, 2011)	1. Penunjukan 5k Perbendaharaan 2. Budaya kerja 3. Penyelesaian Administrasi 4. Jumlah Pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa 5. Proses pemeriksaan dokumen kontrak 6. Penentuan harga perkiraan sendiri 7. Kapasitas pihak rekanan 8. Tahap dalam verifikasi SPM 9. Jadwal anggaran kas 10. Pencairan uang kepada pihak rekanan (Malahayati et al., 2015)	<i>Ordinal</i>
Komitmen Organisasi	Komitmen organisasi ialah level pegawai meyakini dan menerima sasaran organisasi dan kepentingan organisasi. Melalui komitmen ia mampu mempunyai sikap loyal dan keinginan dalam meraih tujuan organisasi tersebut. (Mathis & Jackson, 2006)	1. Komitmen bersifat afektif 2. Komitmen normatif 3. Komitmen berkelanjutan (Rusli, 2014)	<i>Ordinal</i>

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data studi ini ialah regresi linier berganda. (Ghozali, 2016) mengemukakan bahwa teknik tersebut untuk melakukan pengukuran korelasi variabel bebas dan terikat dalam dua atau lebih variabel. Berikut ialah persamaannya:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = tingkat penyerapan anggaran
 a = konstanta
 X1 = rencana Anggaran
 X2 = kualitas SDM
 X3 = laksana anggaran
 X4 = komitmen organisasi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Kofisien variabel bebas
 e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Tingkat partisipasi Pegawai Pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan bagi studi ini sangat baik, yang diperlihatkan melalui level pengembalian angket 92,9% kemudian dilakukan pengolahan dan dipergunakan dalam uji hipotesis, diketahui ciri khas responden berikut:

Tabel 2

Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
➤ Laki-laki	49	62,82%
➤ Perempuan	29	37,17%
Jumlah	78	100%
Usia:		
➤ 22-29	19	24,35%
➤ 30-37	27	34,61%
➤ 38-45	20	25,64%
➤ 46-53	12	15,38%
Jumlah	78	100%
Pendidikan terakhir:		
➤ D3	40	51,28%
➤ S1	38	48,71%
➤ S2	-	-
➤ S3	-	-
Jumlah	78	100%
Jabatan saat ini:		
➤ Kepala OPD/Pengguna Anggaran (PA)	21	26,92%
➤ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	19	24,35%
➤ Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran	19	24,35%
➤ Bendahara Pengeluaran	19	24,35%
Jumlah	78	100%

Sumber: Data Primer (2021)

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan dalam melakukan analisis data atas perolehan hasil responden bagi setiap indikator ukuran variabel. Uji ini mencakup mean, maximum, minimum, serta standar deviasi. Analisis uji ini terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Tingkat Penyerapan Anggaran	78	1	5	3,41346	1,03269
Perencanaan Anggaran	78	1	5	4,33974	0,64283
Kualitas Sumber Daya Manusia	78	2	5	4,01795	0,62165
Pelaksanaan Anggaran	78	1	5	3,00615	1,09588
Komitmen Organisasi	78	3	5	4,4359	0,55766

Sumber: Data Olahan (2021)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3, menunjukkan nilai minimal, maksimal, mean, dan standar deviasi dari analisis data atas prolehan hasil jawaban responden dari setiap indikator ukuran variabel.



Hasil Uji Kualitas data

Hasil Uji Validitas

Uji ini menampilkan ketepatan angket yang disebarkan dengan melakukan perbandingan r hitung dan r tabel, r tabel dengan $df = N-2$. Akumulasi responden studi ini ialah 78, sehingga $df = 76$ dan $r(0,05;76) = 0,2227$. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka dianggap valid (Ghozali, 2012)

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	R hitung	R tabel	Keterangan
Tingkat Penyerapan Anggaran	0,675 – 0,797	0,2227	Valid
Perencanaan Anggaran	0,582 – 0,746	0,2227	Valid
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,216 – 0,746	0,2227	Valid
Pelaksanaan Anggaran	0,641 – 0,884	0,2227	Valid
Komitmen Organisasi	0,564 – 0,856	0,2227	Valid

Sumber: Data Output SPSS 22

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan untuk setiap variabel dalam kuesioner adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation* $> 0,2227$. Dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden, dapat dijadikan alat ukur yang tepat $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menampilkan besarnya instrumen mampu diandalkan dalam pengumpul data. Metode dalam penelitian ini ialah Alpha Cronbach yang dianggap reliable bila mempunyai skor lebih dari 0,60.(Ghozali, 2012)

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
1.	Tingkat Penyerapan Anggaran	0,726 $> 0,60$	Reliabel
2.	Perencanaan Anggaran	0,770 $> 0,60$	Reliabel
3.	Kualitas Sumber Daya Manusia	0,791 $> 0,60$	Reliabel
4.	Pelaksanaan Anggaran	0,902 $> 0,60$	Reliabel
5.	Komitmen Organisasi	0,633 $> 0,60$	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS 22

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 5, menunjukkan bahwa instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha $> 0,60$. Jadi, hasil ukur tiap variabel yang akan didapatkan dapat diandalkan.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini dalam mencari tahu besarnya pengaruh keterkaitan variabel bebas dan terikat yang secara bersamaan dapat dihitung dalam persamaan regresi berganda. Berikut ini ialah hasilnya:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,036	2,147		3,743	,000
	Perencanaan Anggaran	,152	,066	,206	2,285	,025
	Kualitas Sumber Daya Manusia	,137	,055	,278	2,514	,014
	Pelaksanaan Anggaran	,207	,052	,454	3,993	,000
	Komitmen Organisasi	,311	,141	,195	2,206	,030

Sumber: Data Output SPSS 22

Dalam hasil tersebut diketahui persamaan regresi yang terbentuk, yakni:

$$Y = 8,036 + 0,152 X_1 + 0,137 X_2 + 0,207 X_3 + 0,311 X_4 + e$$

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Analisis ini dilakukan dalam melihat persentase pengaruh setiap variabel bebas bagi variabel terikat

Tabel 7

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate	Durbin-Watson
1	,763 ^a	,581	,567	1,585	2,047

Sumber: Data Output SPSS 22

Atas hasil tersebut diketahui skor R Square 0,581 sehingga level serapan anggaran yang dipengaruhi rencana anggaran, kualitas SDM, tata laksana anggaran, serta komitmen dalam organisasi sebesar 58,1% sedangkan 41,9% lainnya dipengaruhi variabel di luar studi ini yakni sistem kendali internal pemerintah, tata laksana anggaran, penyediaan produk, serta lingkungan dalam birokrasi.

Hasil Uji Hipotesis Pertama: Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (H₁)

Berdasarkan output uji regresi pada tabel 9, skor koefisien regresi perencanaan anggaran 0,152 dan skor signifikan 0,025 < 0,05 sehingga didapat simpulan bahwa rencana anggaran (X₁) memberi pengaruh signifikan bagi level serapan anggaran (Y). Perencanaan anggaran harus berkesinambungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibuat secara akurat berdasarkan aturan yang berlaku sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan tepat. Berdasarkan pelaporan Dirjen Perimbangan Keuangan (2013), ukuran level serapan belanja daerah untuk memberi dana layanan politik dipengaruhi proses rencana anggaran yang memberi sumbangan bagi serapan anggaran, apabila rencana anggaran semakin baik maka serapan anggaran pun demikian.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Hamidah, 2020), (Suyono, 2020), (Harahap et al., 2020), (Ardinisari, 2019), (Aviana, 2018), (Ramdhani & Anisa, 2017), (Jauhari, 2017), (Putri et al., 2017), (Zarinah et al., 2016), dan (Malahayati et al., 2015) yang menemukan bahwa rencana anggaran memberi pengaruh bagi serapan anggaran. Hal ni berbeda dalam studi (Rifai et al., 2016), dan (Indriani, 2016) bahwasannya rencana anggaran tidak memberi pengaruh bagi serapan anggaran.



Hasil Uji Hipotesis Kedua: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (H₂)

Berdasarkan dari output uji regresi tabel 9, skor koefisien regresi untuk kualitas SDM 0,137 dan skor sig. 0,014 < 0,05 maka kualitas SDM (X₂) memberi pengaruh signifikan bagi serapan anggaran (Y). Sumber daya manusia pada OPD Kabupaten Pelalawan harus memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, pelatihan, dan pendidikan sehingga responden mampu menyelesaikan tugasnya secara bertanggungjawab dan tepat waktu, khususnya dalam hal membantu pemerintah melaksanakan penyerapan anggaran dengan tepat. Fungsi pemerintah yang menjadi SDM diwujudkan dalam praktikal aktivitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara serta penggunaan dan efisien dan efektif yang menjelaskan kualitas SDM mampu memberikan pengaruh bagi level serapan anggaran.

Hal ini sesuai dalam studi (Hamidah, 2020), (Ardinisari, 2019), (Ramdhani & Anisa, 2017), (Putri et al., 2017), (Indtiani, 2016), dan (Zarinah et al., 2016) yang menjelaskan bahwasanya kualitas SDM memberi pengaruh bagi level serapan anggaran. Lain halnya dengan studi (Rerung et al., 2017) dan (Rifai et al., 2016) bahwa kualitas SDM tidak membawa pengaruh bagi tingkat serapan anggaran.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga: Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (H₃)

Berdasarkan dari output uji regresi pada tabel 9, skor koefisien regresi dalam pelaksanaan anggaran 0,207 dan skor sig. 0,000 < 0,05 maka pelaksanaan anggaran (X₃) memberikan pengaruh signifikan bagi tingkat serapan anggaran (Y). Pelaksanaan anggaran ialah alat manajemen perencanaan serta pengendalian keuangan organisasi serta kebijakan perekonomian untuk melakukan pengarahan bagi situasi ekonomi agar lebih baik melalui perubahan belanja dan penerimaan pemerintah (Ari Romadoni, 2014). Besarnya pelaksanaan anggaran akan berdampak pada semakin meningkatnya serapan anggaran, tata laksana anggaran akan membawa pengaruh bagi serapan APBD (Gagola et al., 2017).

Output ini memberikan dukungan bagi studi (Suyono, 2020), (Harahap et al., 2020), (Aviana, 2018), (Ramdhani & Anisa, 2017), (Jauhari, 2017), dan (Malahayati et al., 2015) yang menemukan bahwa pelaksanaan membawa pengaruh bagi tingkat serapan anggaran. Lain halnya berdasarkan studi (Rifai et al., 2016), bahwasannya tata laksana anggaran tidak membawa pengaruh bagi tingkat serapan anggaran.

Hasil Uji Hipotesis Keempat : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (H₄)

Berdasarkan dari output uji regresi pada tabel 9, skor koefisien regresi komitmen organisasi 0,311 dan skor sig. 0,030 < 0,05 maka komitmen organisasi (X₄) memberi pengaruh signifikan bagi tingkat serapan anggaran (Y). Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge memberikan definisi komitmen ialah kondisi individu memihak organisasi dan tujuan maupun keinginannya dalam melakukan pertahanan keanggotaan suatu organisasi. Komitmen ialah upaya yang satu padu bagi anggota organisasi dalam melakukan perwujudan tujuan organisasi berdasarkan perencanaan. Menurut (Mathis & Jackson, 2006), komitmen organisasi ialah level individu memiliki kedudukan dalam organisasi serta keinginan dalam melakukan pelanjutan upaya dalam meraih kepentingan organisasi. Organisasi dalam studi ini ialah perangkat daerah dengan beranggotakan ASN Daerah.

Hasil studi ini memberikan dukungan studi (Hamidah, 2020), (Suyono, 2020), dan (Putri et al., 2017) yang melakukan penemuan komitmen organisasi membawa pengaruh bagi level serapan anggaran. Lain halnya dengan studi (Ardinisari, 2019), bahwasannya komitmen organisasi tidak membawa pengaruh bagi tingkat serapan anggaran.

SIMPULAN

Dari Penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu rencana anggaran, kualitas SDM, tata laksana anggaran, serta komitmen organisasi membawa pengaruh bagi serapan APBD OPD di Kabupaten Pelalawan. Studi ini mempunyai keterbatasan yang hanya mencakup Kepala OPD, pejabat kuasa penggunaan anggaran atau KPA, Pejabat pelaksanaan teknis anggaran, serta bendahara dalam pengeluaran. Sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi sebagai hasil yang pasti dalam lingkungan OPD Pelalawan, tetapi hanya sebatas kemungkinan besar (probabilitas), tergantung dari besaran populasi dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Studi ini menggunakan rencana anggaran, kualitas SDM, tata laksana anggaran, serta komitmen dalam organisasi. Sedangkan terdapat banyak variabel lain yang kemungkinan membawa pengaruh bagi tingkat serapan anggaran yang tidak diteliti sebagai variabel mediasi. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat menggunakan selain metode survei atau kuesioner, sebagaimana metode wawancara dalam memperoleh komunikasi dua arah dan memperoleh kejujuran subjek. Penelitian kedepannya perlu menambah variabel bebas selain dalam penelitian ini dalam melakukan pengembangan penelitian melalui tambahan variabel lain yang mungkin membawa pengaruh bagi efektivitas serapan anggaran misalnya sistem pengendalian internal pemerintah, tata laksana anggaran, serta penyediaan produk dan lingkungan dalam birokrasi.

Dari output studi ini mampu dijadikan masukan pemerintah dalam melakukan evaluasi rencana anggaran, SDM, tata laksana anggaran, hingga komitmen organisasi yang telah ada untuk dapat meningkatkan penyerapan anggaran yang efektif. Penelitian ini mampu menjadi rujukan OPD, untuk mengevaluasi penyerapan anggaran pada setiap OPD yang ada. Dimana proses perencanaan anggaran yang baik mampu meningkatkan penyerapan anggaran dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, maka diharapkan OPD akan mengalami peningkatan yang semakin baik serta dapat meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan visi dan misi.

REFERENSI

- Ardinisari, M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran. *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.
- Ari, R. (2016). *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Ta. 2010 – Ta. 2014)*.
- BPKB. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran Yogyakarta*. Paris Review.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Friana, H. (2018). *Serapan Anggaran Rendah, Apa Dampaknya Bagi Publik*. Tirto.Id.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- ghozali, imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS. In Semarang, *Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Grezo, S. D. (2011). *Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran ...*
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Hamidah, W., Anisma, Y., & Safitri, D. (2020). Studi Empiris Penyerapan Anggaran dan Faktor Determinasinya Pada pemerintah Kota Pekanbaru. *Current :Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 1*(3), 363–381.
- Harahap, S., Taufik, T., & Nurazlina. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan



- anggaran , Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1–10.
- Herriyanto, H. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta. *Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Jauhari, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kppn Bandung I Dan Kppn Bandung II. *Doctoral Dissertation Universitas Pasundan*.
- Kuswoyo, I. D. (2012). *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri)*. Universitas Gadjah Mada.
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 11–19. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4451/3832>
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). *Human Resource Management* (10th ed.). Salemba Empat.
- Putri, K. M. R., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Assets*, 8(1), 120–132.
- Putri, S. I. (2014). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Loyalitas Karyawan terhadap Kinerja Karyawan PT Kurnia Alam Perista Kudus. *Skripsi*.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 192–202. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati, S. M. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pad SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 1–10.
- Robbins, S. P., & Coulter. (2002). *Management 7th. USA: Pearson Education Inc.*
- Rusli, G. A. Z. (2014). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Job-Relevant Information Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perhotelan Di Provinsi Riau*.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work, Models For Superior Performance*.
- Sutrisno, E., & Mariyono, J. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat (Keluarganya Warga Binaan Pemasarakatan) Pada Lembaga Pemasarakatan KelaS IIB SLAWI. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v1i1.767>
- Suyono, N. A. (2020). Antecedent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(1), 79–91.

<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1083>

- Syarah, F. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Wilayah KPPN I Di Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.

